

## **TEORI ELIT KEKUASAAN**

**( Pengaruh Elit Pendidikan Agama terhadap Kebijakan Sosial-Keagamaan )**

**Muhammad Taufiqur Rahman<sup>1</sup>Maftuh<sup>2</sup> Mohammad Rofiq<sup>3</sup>**

E-Mail: [muhammaddaufiqurrohman280200@gmail.com](mailto:muhammaddaufiqurrohman280200@gmail.com)<sup>1</sup> , [maftuh10@gmail.com](mailto:maftuh10@gmail.com)<sup>2</sup>  
[berhasilrofiq1@gmail.com](mailto:berhasilrofiq1@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

### **Abstrak**

Teori elit kekuasaan menegaskan bahwa kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kelompok elit yang memiliki otoritas, sumber daya, dan legitimasi sosial. Dalam konteks masyarakat religius seperti Indonesia, elit pendidikan agama menempati posisi strategis sebagai aktor sosial yang mampu memengaruhi arah kebijakan sosial-keagamaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elit pendidikan agama terhadap kebijakan sosial-keagamaan dengan menggunakan pendekatan teori elit kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan menganalisis literatur ilmu sosial, pendidikan, dan kajian keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa elit pendidikan agama berperan signifikan dalam membentuk wacana publik, legitimasi kebijakan, serta arah moderasi beragama melalui otoritas keilmuan dan simbolik yang dimilikinya. Namun, dominasi elit ini juga berpotensi menimbulkan eksklusivisme jika tidak diimbangi dengan prinsip inklusivitas dan partisipasi sosial.

Kata kunci : teori elit, pendidikan agama, kebijakan sosial-keagamaan, kekuasaan, moderasi beragama

### **Abstract**

Elite power theory emphasizes that public policies are often shaped by elite groups possessing authority, resources, and social legitimacy. In religious societies such as Indonesia, religious education elites occupy a strategic position as social actors capable of influencing socio-religious policies. This article aims to analyze the influence of religious education elites on socio-religious policies through the perspective of elite power theory. This qualitative study employs library research by examining literature from social sciences, education, and religious studies. The findings indicate that religious education elites significantly shape public discourse, policy legitimacy, and the direction of religious moderation through their scholarly and symbolic authority. Nevertheless, elite dominance may lead to exclusivism if not balanced by inclusivity and social participation.

Keywords : elite theory, religious education, socio-religious policy, power, religious moderation

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan sosial-keagamaan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor sosial yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam

perspektif ilmu sosial, teori elit kekuasaan menjelaskan bahwa kelompok tertentu dengan sumber daya intelektual, simbolik, dan struktural memiliki pengaruh dominan dalam proses pengambilan keputusan publik. Di masyarakat yang religius, elit pendidikan agama seperti ulama, akademisi PAI, pimpinan pesantren, dan tokoh ormas Islam sering kali menjadi rujukan utama dalam merumuskan sikap sosial dan kebijakan keagamaan.

Fenomena ini terlihat dalam berbagai kebijakan sosial-keagamaan, mulai dari kurikulum pendidikan agama, regulasi moderasi beragama, hingga respons negara terhadap isu-isu keagamaan kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana elit pendidikan agama berperan dalam struktur kekuasaan dan sejauh mana pengaruh mereka terhadap kebijakan sosial-keagamaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Teori Elit Kekuasaan**

Teori elit kekuasaan berakar dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan C. Wright Mills. Pareto memandang masyarakat terbagi atas elit dan non-elit, di mana elit memiliki kemampuan mengendalikan sumber daya strategis. Mosca menekankan konsep *ruling class* yang selalu hadir dalam setiap sistem sosial. Sementara itu, Mills melalui konsep *power elite* menjelaskan keterkaitan antara elit politik, ekonomi, dan intelektual dalam mengendalikan kebijakan publik.

Dalam konteks pendidikan dan agama, elit tidak selalu berbentuk kekuasaan politik formal, tetapi juga kekuasaan simbolik dan kultural. Otoritas keilmuan, legitimasi moral, serta pengakuan sosial menjadikan elit pendidikan agama sebagai aktor penting dalam konstruksi kebijakan sosial-keagamaan.

### **2. Elit Pendidikan Agama Sebagai Aktor Sosial**

Elit pendidikan agama memiliki posisi strategis karena berada di persimpangan antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai keagamaan, dan kepentingan sosial. Mereka berperan sebagai:

- a. **Produsen Wacana Keagamaan**, melalui kurikulum, fatwa, dan kajian akademik
- b. **Mediator Negara dan Masyarakat**, dalam menerjemahkan kebijakan keagamaan
- c. **Legitimotor Kebijakan**, dengan memberikan justifikasi normatif dan teologis

Dalam banyak kasus, pandangan elit pendidikan agama dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan sosial-keagamaan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

### **3. Pengaruh Elit Pendidikan Agama Terhadap Kebijakan Sosial Keagamaan**

Pengaruh Elit Pendidikan Agama Terhadap Kebijakan Sosial-Keagamaan Dapat Dilihat Dalam Beberapa Aspek. Pertama, dalam perumusan kebijakan, elit pendidikan agama sering dilibatkan sebagai penasihat atau tim ahli. Kedua, dalam implementasi kebijakan, mereka berperan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai kebijakan kepada masyarakat. Ketiga, dalam evaluasi kebijakan, pandangan elit pendidikan agama kerap menjadi tolok ukur legitimasi sosial.

Namun demikian, dominasi elit pendidikan agama juga memiliki tantangan. Jika kekuasaan elit bersifat eksklusif dan tidak membuka ruang dialog, kebijakan sosial-keagamaan berpotensi mengabaikan keragaman sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan moderat dan partisipatif agar peran elit pendidikan agama benar-benar mencerminkan kepentingan publik yang inklusif.

### **4. Implikasi Bagi Pendidikan Agama Islam**

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pemahaman terhadap teori elit kekuasaan penting untuk membentuk kesadaran kritis pendidik dan akademisi. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai transmisi nilai normatif, tetapi juga sebagai ruang refleksi sosial yang mendorong keadilan, toleransi, dan moderasi beragama. Dengan demikian, elit pendidikan agama diharapkan mampu menggunakan pengaruhnya secara etis dan transformatif.

## **KESIMPULAN**

Teori elit kekuasaan memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami pengaruh elit pendidikan agama terhadap kebijakan sosial-keagamaan. Elit pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk wacana, legitimasi, dan arah kebijakan sosial-keagamaan. Namun, pengaruh tersebut harus diimbangi dengan prinsip inklusivitas dan moderasi agar tidak melahirkan dominasi yang eksklusif. Pendidikan agama yang kritis dan kontekstual menjadi kunci dalam memastikan peran elit pendidikan agama berkontribusi positif bagi kehidupan sosial yang harmonis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Kencana.
- Berger, P. L. (1999). *The Desecularization of the World*. Eerdmans.

- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite*. Oxford University Press.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. McGraw-Hill.
- Pareto, V. (1968). *The Rise and Fall of Elites*. Bedminster Press.